

**EMANSIPASI DAN KEPENTINGAN JENDER :
PERPEKTIF ANGGOTA LEGISLATIF WANITA
DATI II DI JAWA TIMUR**

45

PAMERAN

1-1 MAY 2004

Ketua Peneliti :

Dra. Ec. Eva Kusuma S., MA.

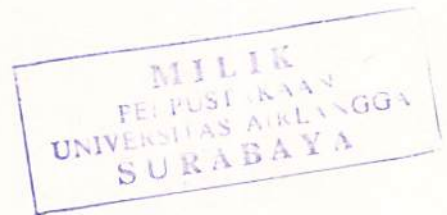
30/304
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 172/XXIII/3/--/1997 Tanggal 20 Mei 1997
Kontrak Nomor : 270/P2 IPT/DPPM/SKW/V/1997
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 06

WOMEN IN DEVELOPMENT

**EMANSIPASI DAN KEPENTINGAN JENDER :
PERPEKTIF ANGGOTA LEGISLATIF WANITA
DATI II DI JAWA TIMUR**

KKB
KK-2B
305.3
Sun
e



Ketua Peneliti :

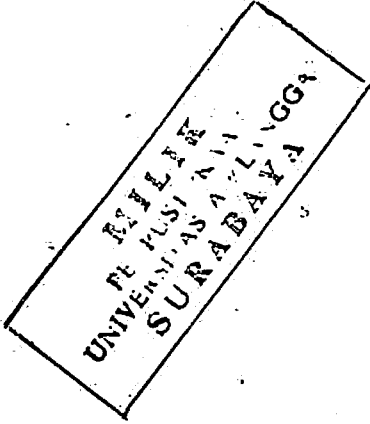
Dra. Ec. Eva Kusuma S., MA. .

3000 011993141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Dibiayai Oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 172/XXIII/3/--/1997 Tanggal 20 Mei 1997
Kontrak Nomor : 270/P2 IPT/DPPM/SKW/V/1997
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 06**

2000 011993141





- 1. Puslit Pembangunan Regional
- 2. Puslit Obat Tradisional
- 3. Puslit Pengembangan Hukum
- 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
- 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
- 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
- 7. Puslit Olahraga
- 8. Puslit Bioenergi
- 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
- 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi

Kampus C, Jl. Mulyorejo Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246, Surabaya 60115

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA

1. a. Judul Penelitian	: Emansipasi Wanita dan Kepentingan Jender, Studi Perspektif Anggota Legislatif Wanita di Jawa Timur		
b. Macam penelitian	: () Dasar <input checked="" type="checkbox"/> Terapan () Pengembangan		
c. Kategori	: X / II / XX *		
2. Kepala Proyek Penelitian :			
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Dra.Ec. Eva Kusuma Sundari, M.A.		
b. Jenis Kelamin	: <input checked="" type="checkbox"/> / P		
c. Pangkat/Gol. Dan NIP.	: Penata Muda - III/a - 131 999 639		
d. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli Madya		
e. Fakultas/Jurusan	: Ekonomi		
f. Univ./Inst./Akademi/Instansi *)	: Universitas Airlangga		
g. Bidang Ilmu Yang Diteliti	: Ekonomi Pembangunan dan Ilmu Politik		
3. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang		
4. Lokasi Penelitian	: Jawa Timur		
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan :			
a. Nama Instansi	: -		
b. Alamat	: -		
6. Jangka Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan		
7. Biaya Yang Diperlukan	: Rp 5.000.000,00		
8. Seminar Hasil Penelitian			
a. Dilaksanakan Tanggal	: 19 Januari 1998		
b. Hasil Penilaian	: (-) Baik Sekali <input checked="" type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang		

Surabaya,

Ketua Peneliti,

Dra.Ec.Eva Kusuma S., M.A.

NIP. 131 999 639

Mengetahui :
Kapuslit Studi Wanita,

Dra. Day Susanti, M.A.

NIP. 131 406 097

Menyetujui :
Lembaga Penelitian Unair,



RINGKASAN

EMANSIPASI WANITA DAN KEPENTINGAN GENDER, STUDI PERSPEKTIF ANGGOTA WANITA DEWAN LEGISLATIF TINGKAT II JAWA TIMUR (Eva Kusuma S., Teetik Rahayuningsih, Sri Hartini, 1997 : 40 Halaman)

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi tentang profil anggota wanita DPRD II di Jawa Timur sekaligus mengungkap perspektif mereka tentang emansipasi wanita dan kepentingan gender wanita. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-diskriptif dan dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Nganjuk yang mewakili daerah *abangan*, Pasuruan mewakili daerah *tapal kuda* dan Bangkalan yang mewakili daerah *pesisir*.

Informan yang dipilih adalah seluruh anggota DPRD II yang berjenis kelamin wanita di 3 kabupaten tersebut. Jumlah informan seluruhnya adalah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Tiga permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana profil anggota legislatif wanita Dati II Jatim?; 2) Apa yang dianggap mereka sebagai permasalahan gender (praktis dan strategis)?; 3) Bagaimana pemecahannya?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata visi dan misi informan sebagai feminis amat lemah. Bisa disimpulkan bahwa perspektif mereka seluruhnya berada dalam kerangka *functional-developmental*. Selain salah mengartikan kodrat, ditemukan juga kerancuan dalam memandang bahwa Islam dianggap sebagai pembatas gerakan feminisme yang semestinya merupakan sumber inspirasi gerakan pembebasan wanita.

(L.P. Pusat Penelitian Studi Wanita Universitas Airlangga; Nomer Kontrak : 270/P2IPT/DPPH/SKW/V/1997, 20 Mei 1997)

SUMMARY

WOMAN EMANCIPATION DAN GENDER INTERESTS, STUDY ON PERSPECTIVE OF WOMEN MEMBERS OF LOCAL PARLIEMENT IN EAST JAVA PROVINCE (Eva Kusuma S., Teetik Rahayuningsih, Sri Hartini, 1997 : 40 Pages).

The aim of this study are to get information on the profile of women members of the local parliement in East Java Province and their perspectives on the women emancipation and the women-gender interests. This study uses qualitative-discription approach. By using selective purposive method, 3 districts were selected as research areas. The district of Nganjuk, representing *abangan*/secular area, the district of Pasuruan, representing *tapal kuda* (sadle horse)/ moslem area and the district of Bangkalan, representing the beach area.

The informants are all women who were members of local parliement in the three districts above. The number of informants had been chosen was 15 women. Data was collected through the using of the in depth interview with the informant. The data collected was analyzed using qualitative method.

The result of the study shows that all informants having functional-developmental perspective. This naive and weak feminist's frame of thought had been worsened by the way they understand 'destiny' and Islam. Islam was not understood as source of inspiration for women's liberalization. Instead, it had been positioned as a barrier for women feminists who are struggling for gender equity and equality in their societies.

(Rest. Inst. Research Center For Women Study Airlangga University;
Contract Number : 270/P2IPT/DPPM/SKW/V/1997, May 20, 1997)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penelitian ini bisa dilaksanakan. Proses belajar yang amat bermanfaat telah peneliti terima selama penelitian berlangsung mulai perencanaan hingga penulisan laporan. Terdapat banyak pengalaman berguna yang peneliti dapatkan baik pergulatan intelektual, emosional maupun psiko-motorik.

Pihak-pihak yang amat membantu penelitian ini terutama adalah keikhlasan para informan untuk ditemui dan diajak diskusi. Karena ini merupakan penelitian feminis, maka dengan sengaja upaya penyadaran dilaksanakan terutama setelah interview. Sayang sekali tahap kedua, yaitu diskusi kelompok tidak bisa diselenggarakan karena sulitnya mengumpulkan seluruh informan satu daerah secara bersama-sama. Peneliti sadar bahwa faktor intensitas kesibukan masing-masing politisi wanita begitu padat.

Bantuan yang kedua adalah pihak Lemlit- Unair yang telah mengakomodasi proses pengembangan diri melalui penelitian ini. Termasuk dalam kategori ini adalah kawan-kawan di P3M FE Unair yang telah menemani dan peneliti repoti selama penulisan laporan penelitian. Dengan tulus peneliti mengucapkan terima kasih.

Walau usaha terbaik telah kita lakukan, namun kita tahu bahwa pekerjaan tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam karya tulis ini adalah tanggung jawab peneliti. Tentu saja setiap masukan dan kritik akan kita terima dengan terbuka.

Surabaya, 19 Desember 1997

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

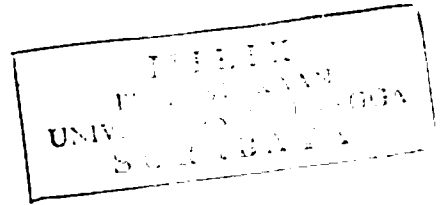
Ringkasan	i
Summary	ii
Kata Pengantar...	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	4
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan	10
3.2. Metode Penelitian	11
3.2.1. Ruang Lingkup	11
3.2.2. Populasi dan Sampel	11
3.2.3. Prosedur Penumpulan Data	12
3.3. Teknik Analisis Data	13
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Informan	14
4.1.1. Distribusi Menurut Umur	15
4.1.2. Distribusi Menurut Tingkat Pendidikan	16
4.1.3. Distribusi Menurut Asal Partai	17
4.1.4. Jabatan dalam Komisi/ Dewan	18
4.1.5. Menurut Asal Ormas	21
4.1.6. Status Perkawinan	22
4.2. Emansipasi Berdasar Islam	23
4.3. Persoalan Mendasar Wanita	26
4.4. Melihat Penyebab Persoalan	30
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	35
5.2. Saran	37
 Daftar Pustaka.....	 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 2 : Distribusi Informan Menurut Umur	15
Tabel 3 : Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel 4 : Informan Menurut Asal Partai	18
Tabel 5 : Posisi Informan dalam Komisi/ Dewan	21
Tabel 6 : Informan Menurut Asal Ormas	22
Tabel 7 : Status Perkawinan Para Informan	23

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Pendahuluan

Isu tentang emansipasi wanita (dan lingkungan) berikut isu tentang persoalan gender masih menjadi primadona dalam perbincangan di tingkat moral maupun gerakan sosial. Di Barat sendiri, sejak isu ini digulirkan, nasib perempuan dapat diperbaiki secara radikal. Bukan saja persoalan persoalan keseharian wanita telah disentuh, namun isu ini mampu pula mendobrak tradisi kemapanan bidang-bidang ilmu pengetahuan. Munculnya *Eco-feminism*, *Methodology Discourse*, *Gender Economics* menunjukkan betapa kuat pengaruh gerakan emansipasi tersebut.

Namun, meski sudah sejak Pelita III isu gender dititipkan melalui program-program pembangunan, perbaikan nasib wanita Indonesia tidak sepesat di Barat. Sebaliknya, ditinjau dari ruang lingkup aktifitasnya, kualitas organisasi wanita Indonesia justru mengalami kemunduran dibanding di tahun 50-an (Wierenga, 1995). Fakta memprihatinkan tentang rendahnya angka partisipasi perempuan di sektor publik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya (Norhadı dan Hubeis 1990) diperburuk dengan kondisi perempuan akibat kekerasan dan ketidakadilan hukum (Kalyanamitra 1992).

Ada hambatan struktural dan kultural yang menghalangi isu ini berpengaruh tidak sekuat di Barat. Terutama adalah karena isu gender masih ditempatkan di sektor privat/belakang, yaitu di luar wilayah urusan negara. Mitos ini sudah pernah dicoba untuk dibongkar. Namun, cara yang paling efektif adalah dengan mengupayakan membawa persoalan gender ke arena politik. Dengan kata lain adalah harus ada upaya mempolitisasi persoalan gender.

Upaya mempolitisasi persoalan gender ini akan lebih masuk akal jika dilaksanakan oleh politisi wanita. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya perempuan lebih bisa berempati terhadap persoalan wanita. Sayangnya, logika keniscayaan tersebut gugur oleh pendapat Brigjen Rukmini (almarhumah) yang mengungkap fakta bahwa meskipun para wanita duduk di badan legislatif, ternyata tidak ada dampak substansial bagi perbaikan nasib wanita Indonesia (Surya, 5 Juli 1996).

Persoalan di atas menyebabkan kesangsian kita akan basis intelektual politisi wanita terhadap persoalan emansipasi wanita dan kepentingan gender wanita. Tentu saja, bekal pengetahuan tentang dua hal tersebut perlu dimiliki agar kapasitas dan kemampuan mereka sebagai pembawa aspirasi wanita menjadi memadai.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui perspektif anggota legislatif wanita tentang emansipasi wanita/ feminisme dan kepentingan jender, maka pokok-pokok permasalahan yang ada dalam studi ini adalah:

- * Bagaimana profil anggota legislatif wanita Dati II Jatim?
- * Apa yang dianggap mereka sebagai persoalan jender?
- * Apa penyebab persoalan tersebut?
- * Bagaimana pemecahannya (kepentingan jender praktis/ strategis)?

Diharapkan, pertanyaan-pertanyaan di atas akan mampu menunjukkan diskursus emansipasi/ feminisme yang di kalangan anggota legislatif wanita di Jawa Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan tunggal penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang perspektif politisi wanita (anggota DPRD tingkat II) di Jawa Timur. Hal tersebut diperoleh dengan memasukkan data hasil interview pengkategorian-pengkategorian dalam kerangka konseptual yang dibentuk melalui penyediaan ilustrasi empiris.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan dapat membantu memecahkan permasalahan pembangunan terutama dalam kaitan partisipasi politik para wanita Indonesia. Kegunaan lebih lanjut adalah, untuk membantu artikulasi politik persoalan jender yang merupakan cara efektif bagi perbaikan substansial kondisi wanita. Hal ini dapat dicapai apabila hasil penelitian ini diikuti dengan pembinaan/ pelatihan kader partai politik tentang penyadaran/ penguasaan analisis jender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

Gender tiba-tiba menjadi isu penting disamping isu lingkungan dan HAM. Istilah gender yang menjadi terminologi penting bahkan kemudian menjadi metode analisis sosial tersebut dipopulerkan oleh para feminis dunia ketiga (Moser 1987). Namun tidak bisa diingkari bahwa sebagai suatu gerakan sosial, para feminis Dunia Ketiga diinspirasi oleh para feminis Barat (Fakih 1996)

Sebagai suatu gerakan wanita, gerakan tersebut dibangun atas adanya kesadaran emansipasi wanita. Oleh karena merupakan gerakan pembebasan, maka roh dari gerakan mansipasi harus dimuati oleh adanya ide pembebasan wanita (Pietersen 1993).

Pada dasarnya terdapat dua kecenderungan besar dalam cara melihat persoalan wanita (Fakih 1996). Cara pertama adalah dengan analisis Fungsional-Strukturalis yang mensyaratkan perlunya mempertahankan *status quo*. Oleh karenanya interelasi antar lembaga masyarakat dihubungkan melalui konsensus. Dalam menganalisis persoalan wanita, aliran ini cenderung menyalahkan

pihak wanita. Masuk akal, karena permasalahan sistem/struktur tidak dijadikan persoalan.

Sedangkan cara analisis yang kedua adalah didasarkan pada Pendekatan Konflik, yaitu dengan memasalahkan struktur/ sistem dalam melihat akar permasalahan penindasan terhadap wanita. Meski demikian, interpretasi dalam melihat sumber 'penindasan' (sehingga perlu pembebasan) inilah yang kemudian melahirkan banyak aliran feminis dalam gerakan emansipasi. Setidaknya Mansour Fakih (1996) telah memaparkan point-point penting sehingga bisa dibuat peta aliran-aliran feminisme sebagaimana di bawah ini:

ALIRAN	DASAR PEMBEDAAN GENDER	AKAR PERMASALAHAN	KERANGKA KERJA
Liberal	public-private dichotomy	tidak kompetitifnya perempuan	Industrialisasi
Radikal	Biologis	Patriarkhi	Personal is political
Marxis	Penindasan Kelas dalam hubungan produksi	Kapitalisme	Revolusi
Sosialis	Biologis Kelas	Patriarkhi Kapitalisme	Kesadaran Kelas Personal is political
Eco-Feminism	Perusakan alam	Strategy Growth dari Kapitalisme	Sustainable Growth
Black Feminist	Penindasan	Kapitalisme Racial Ideology	Kesadaran Kelas Personal is political

Diskemakan dari uraian Fakhri 1995, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (pen)

Meski demikian, menurut Maria Mies (1991) strategi 'pembebasan' wanita dari penindasan harus didasarkan pada pemenuhan 2 kebutuhan wanita. *Pertama*, kebutuhan *feminine* yaitu menyangkut kebutuhan sehari-hari wanita sebagai ibu rumah tangga, istri ataupun sebagai anggota masyarakat. Pemenuhan kebutuhan jenis ini akhirnya pada akhirnya melahirkan kepentingan jender praktis. *Kedua*, kebutuhan *feminist* yaitu kebutuhan karena dia sebagai seorang wanita, sebuah entity utuh yang berhak

atas penghargaan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kebutuhan jenis ini melahirkan jenis kepentingan jender strategis.

Secara lebih detail, ada definisi tentang dua jenis kepentingan jender di atas, yaitu:

Kepentingan Jender, Maxine Molyneux (1986) kepentingan jender didefinisikan sebagai:

"...are those that women (or men for that matter) may develop by virtue of their social positioning through gender attributes..."

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kepentingan jender bisa berupa kepentingan strategis atau kepentingan praktis. Masing-masing dibentuk dengan cara yang berbeda serta mendatangkan implikasi yang berbeda pula bagi wanita. Pengertian Molyneux tentang keduanya adalah sbb:

Kepentingan jender strategis:

"...are derived...deductively, i.e., from the analysis of women's subordination and from formulation of an alternative, more satisfactory set of arrangements to those that exist. These ethical and theoretical criteria assist in the formulation on strategic objectives to overcome women's subordination..."

Kepentingan jender praktis:

"...are given inductively and arise from the concrete conditions of women's positioning by virtue of their gender within the division of labor..."

Meski demikian, Alvarez (1995), menemukan bahwa karena wanita juga merupakan anggota kelas, kelas

kelompok, dan ras tertentu, maka terjadi saling memotong antar kepentingan-kepentingan tersebut. Misalnya, perjuangan strategis dari para pembantu rumah tangga akan memotong kepentingan praktis dari para wanita kelas menengah/ atas. Kepentingan dalam memperhatikan *status quo* kelas inilah yang terasa lebih dominan sebagai orientasi tindakan para wanita kelas menengah/ atas.

Jika dikaitkan dengan implikasi dari perjuangan kepentingan jender, maka perbaikan status wanita amat tergantung pada perjuangan jender strategis. Oleh karenanya, perjuangan kepentingan jender harus diletakkan dalam kerangka mengemansipasikan wanita, yaitu upaya pembebasan wanita wanita dari pembatas-pembatas legal yang manifestasinya berupa subordinasi (Nederveen 1992).

Di lain pihak, untuk menghindari generalisasi kasus dan agar supaya diperoleh pengetahuan yang sesuai dengan konteks, maka penelitian ini harus dikaitkan dengan konsep-konsep Islam tentang dua hal tersebut. *Discourse* Islam tentang Feminisme/ emansipasi dan Kepentingan Jender ini merujuk ciri khusus masyarakat Indonesia yang terbukti menggali konsep bersumber dari Islam untuk dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian dalam peta perspektif nantinya *discourse* Islam akan menjadi bagiab paralel dari *discourse-discourse* Emansipasi/ Feminisme yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan induktif sekaligus deduktif. Hal yang demikian adalah mungkin dilaksanakan berdasar dari pendapat Patton sebagaimana yang dikutip di bawah:

As the research begins the investigator is open to whatever emerges from the data, a discovery or inductive approach. Then, as the inquiry reveals patterns and major dimensions of interest, the investigator will begin to focus on verifying and elucidating what appears to be emerging- a more deductive approach to data collection and analysis (Patton 1980)

Tegasnya, proses penelitian ini menggunakan konstruksi konsep yang muncul secara paralel dengan investigasi dari data empiris. Investigasi terbuka di awal akan membantu membentuk kerangka konseptual, yang dalam proses kemudian digunakan untuk menyeleksi data dalam suatu sistematika. Pada akhir analisa, data digunakan untuk menguji atau menolak kerangka yang telah teridentifikasi di awal (Uhlir 1996)

Namun, menyadari bahwa kata "feminisme" sering menakutkan para wanita Indonesia maka untuk menggali perspektif mereka tentang feminisme pertanyaan kuncinya menggunakan kata "emansipasi". Hal tersebut tidak akan merupakan persoalan

besar, mengingat bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan substansial dalam dua konsep tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Kerangka Teori. Sebaliknya, keduanya justru sebagai unsur dalam konsep yang lebih besar yaitu Konsep Demokrasi.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini mengkaji tentang eksplorasi perspektif tentang emansipasi wanita dan kepentingan jender dari anggota legislatif tingkat II di Jawa Timur.

3.2.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh anggota legislatif wanita di Jawa Timur yang meliputi 37 Dati II. Metode penarikan sampel menggunakan metode purposive dengan acuan karakteristik unik masyarakat Jawa Timur. Berdasar penelitian Golkar pada Pemilu 1992, maka masyarakat Jawa Timur terbagai menjadi 3 yaitu:

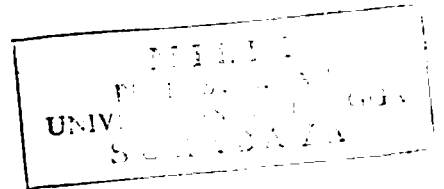
Wilayah Mataraman, yaitu dimana dalam kesehariannya masyarakat kuat dipengaruhi nilai-nilai budaya Jawa Tengah (Budaya Abangan). Wilayah ini meliputi Ngawi, Madiun, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan. Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai sampel mewakili daerah ini dalam penelitian. Dari

kabupaten ini terdapat 5 anggota legislatif wanita

seluruhnya berasal dari Fraksi Karya Pembangunan merupakan informan dalam penelitian ini.

Wilayah Pesisir, dimana masyarakatnya kuat dipengaruhi budaya pesisir. Daerah-daerah di Madura, Gresik, Tuban, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Banyuwangi. Kabupaten Bangkalan dengan jumlah anggota DPRD wanita sebanyak 4 orang dijadikan sampel informan.

Wilayah Tapal Kuda, yaitu wilayah yang masyarakatnya kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Daerah-daerah ini termasuk Pasuruan (Kabupaten dan Kotamadya), Sidoarjo, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Kabupaten Pasuruan dengan 6 anggota wanita (2 dari FPP, 3 dari FKP, dan 1 dari FABRI) dipilih sebagai sampel informan wilayah ini.



3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara bersifat *depth interview* dengan panduan pertanyaan-pertanyaan kunci yang bersifat terbuka. Karena penanya membuka diskusi terbuka, maka proses interview yang berlangsung bersifat *qualitative semi-structured*.

3.3. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Dengan menggunakan konsep Emansipasi Wanita dan Kepentingan Jender maka jelas, analisis akan berada dalam Paradigma Modernisasi. Meski demikian berkembangnya konsep-konsep feminisme yang dikembangkan oleh aliran pos-mo akan pula dipakai sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dari data yang terkumpul melalui interview, bagaimanapun interpretasi peneliti akan berpengaruh besar pada proses penarikan kesimpulan. Apalagi, jika diperhatikan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, dimana terbuka lebar peluang interaksi dan saling mempengaruhi antara peneliti dan informan. Oleh karenanya tidak masuk akal jika mengharapkan penelitian ini akan *value free*. Tetapi ini bukan menjadi persoalan besar karena hal tersebut diletakkan dalam kerangka upaya penyadaran jender.

Penyadaran dalam metodologi feminis dapat dikatakan sebagai upaya pemberdayaan informan. Ini artinya ada suatu perubahan dalam perspektif informan setelah terjadinya interview. Tegasnya, penelitian merupakan media perjuangan gerakan wanita.

Meski demikian, permasalahan tentang reliability dan validity tetap merupakan pertimbangan utama. Oleh karena itu, data yang diolah adalah data yang muncul 'murni' dari kepala informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Informan

Pemilu 1997 menunjukkan hasil yang berbeda di ketiga wilayah sampel. Di Kabupaten Nganjuk kemenangan Golkar merupakan hal yang rutin sejak Pemilu 1971. Demikian pula pada Pemilu 1997, Golkar memenangkan suara sebesar 60%. Sebaliknya di Kabupaten Pasuruan. Partai Persatuan Pembangunan mencapai kemenangan sebesar 45%. Di Kabupaten Bangkalan, Golkar menang sebesar 46%.

Proporsi wanita dibanding pria masih amat sedikit. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Golkar merupakan partai politik yang menempatkan anggota wanita dengan persentase terbesar. Data selengkapnya tentang dua hal tersebut adalah seperti pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1

Distribusi Anggota Legislatif Dati II menurut Jenis Kelamin

Partai Politik	Pria	Wanita	Jumlah
PPP	42 (93%)	3 (7%)	45 (100%)
Golkar	50 (83%)	11 (17%)	61 (100%)
PDI	1	-	1 (100%)
ABRI	26 (96%)	1 (4%)	27 (100%)

Catatan : Angka persentase berasal dari pembulatan terdekat

Angka tersebut di atas menunjukkan bahwa walaupun secara nasional angka partisipasi wanita sebagai anggota legislatif menurun (Forum, Juni 1997) tapi ternyata di tiga daerah tersebut secara keseluruhan angka partisipasi wanita justru meningkat tepat sebesar yang ditargetkan Menteri Peningkatan Peranan Wanita yaitu 17% (Suara Karya, Maret 1997)

Untuk melihat secara lebih detail profil anggota legislatif wanita, maka perlu ditelaah ke dalam poin-poin tertentu sebagaimana di bawah ini.

4.1.1. Distribusi Informan Menurut Umur

Sebagian besar umur para anggota legislatif wanita adalah berkisar antara 40 tahun ke atas (87%). Anggota yang paling muda adalah berusia 38 tahun (FPP) sedangkan yang paling tua adalah berusia 65 tahun (FKP). Selengkapnya distribusi informan menurut usia adalah sebagaimana terlihat di Tabel 2.

Tabel 2: Distribusi Responden Menurut Umur

Umur	Persentase
30-40 tahun	13
40-50 tahun	46
50 tahun ke atas	41
JUMLAH	100%(N=15)

4.1.2. Distribusi Informan menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan paling rendah dari para anggota DPR wanita tersebut adalah lulusan SMTP 7% (1 orang) yang berasal dari Fraksi Karya Pembangunan (unsur Persit). Pendidikan yang tertinggi adalah sarjana sebanyak 4 (26%) orang. Lulusan terbanyak adalah lulusan SMTA atau sederajat (Pondok Pesantren), yaitu sebesar 60%. Sedangkan yang menempuh diploma (D3) pendidikan hanya satu orang. (Selengkapnya lihat Tabel 3).

Tabel 3: Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Persentase
Sarjana	26
Diploma Tiga (D3)	7
SMTA dan sederajat	60
SLTP	7
Jumlah	100%(N=15)

Catatan: Angka Persentase dibulatkan ke angka terdekat

Jelas bahwa memang secara keseluruhan tingkat pendidikan formal informan kurang mendukung tuntutan kualitas informan untuk menjadi politisi. Latar belakang yang paling memadai sebagai politisi, yaitu tingkat sarjana adalah sebanyak 26%. Sedangkan, informan terbanyak (60%) justru hanya sampai pada tingkat SLTA.

Banyak perdebatan tentang relevansi tingkat pendidikan formal dari seseorang dengan kemampuannya sebagai politisi (Hotline Surya, 1997). Pengalaman selama pendampingan Hotline Surya dalam komunitas pekerja seks komersial Surabaya menunjukkan bahwa kemampuan berpolitik seorang

wanita tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan formal. Pengalaman organisasi justru merupakan faktor yang paling penting yang berpengaruh.

Dalam kaitan tersebut di atas, maka perlu dilihat profil informan menurut latar belakang organisasi massanya masing-masing. Penelitian menemukan fakta tentang hal tersebut seperti ditulis di bawah.

4.1.3. Menurut asal Partai

Distribusi responden menurut fraksinya adalah sebagai berikut. Dari ke 15 responden, terbesar berasal dari Fraksi Karya Pembangunan berjumlah 11 orang, dari Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 3 orang dan dari Fraksi ABRI berjumlah satu orang. Tidak satupun anggota legislatif wanita yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Tampak sekali dukungan rakyat kepada PDI versi Konggres amat lemah, karena anggota legislatif dari PDI hanya ada di satu daerah, itupun hanya seorang saja. Dalam perspektif feminis, sikap kontroversial pemerintah dengan mengakui PD-I Surya dan meng'haram'kan PDI-Megawati amat disayangkan. Sebenarnya, dengan penguasaan struktur partai politik oleh wanita akan membuka peluang terartikulasinya aspirasi/kepentingan jender wanita lebih besar (DAWN 1992) atau makin banyaknya wanita berpartisipasi di arena politik.

Tabel 4: Responden menurut Partai Politik

Partai Politik	Persentase
Partai Persatuan Politik	20
Golkar	73
PDI	-
ABRI	7
Jumlah	100%(N=15)

Termarjinalnya wanita di dunia politik makin jelas terlihat di tingkat yang lebih kecil. Para anggota legislatif wanita, terutama yang dari FKP, tidak satupun yang mempunyai posisi pimpinan baik di tingkat dewan maupun di tingkat komisi.

4.1.4. Jabatan dalam Komisi/ Dewan

Jabatan tertinggi dalam dewan adalah sebagai ketua komisi (E yaitu tentang Peranan Wanita). Yang menarik, dari ketiga anggota wanita dari FPP di Kabupaten Pasuruan, dua orang duduk sebagai unsur pimpinan komisi. Yang seorang menjadi Ketua Komisi E (yaitu yang membidangi Urusan Peranan Wanita) dan seorang menjadi wakil ketua komisi B (Ekonomi). Sedangkan satunya adalah wakil ketua komisi E di daerah lain.

Sedangkan 80% dari FKP dan FABRI seluruhnya adalah hanya sebagai anggota komisi biasa meskipun ada di antara mereka yang pada periode pemilihan yang lalu sudah duduk sebagai wakil ketua komisi E, tetapi periode pemilihan berikut justru duduk sebagai anggota komisi di komisi yang sama. Sebaliknya seorang pria muda (27 tahun) yang baru terpilih untuk pertama kali menggantikan kedudukannya sebagai wakil ketua komisi E.

Di Pasuruan, ada seorang wanita yang berasal dari fraksi ABRI. Ini merupakan fenomena menarik, mengingat di dua daerah lain fraksi ini tidak mempunyai perwakilan wanita. Meski demikian, anggota ABRI wanita tersebut berdomisili di Malang sehingga kemampuannya untuk membawa aspirasi penduduk Kabupaten Pasuruan dipertanyakan.

Masih di Pasuruan, ketika ditanyakan mengapa tidak seorangpun wanita dari FKP duduk menjadi unsur di pimpinan baik di komisi maupun di dewan, jawaban yang muncul mengherankan. Salah satu jawaban yang muncul adalah perlunya Golkar mengamankan pembangunan. Jadi yang duduk sebagai ketua komisi B sebaiknya adalah bekas ketua Bappeda. Sedangkan selama ini belum pernah ada wanita yang mampu duduk sebagai ketua Bappeda, jadi tidak mungkinlah diharapkan akan ada wanita yang bisa menjadi ketua Komisi B.

Pendapat di atas tentu saja gampang dipatahkan karena di Kodya Mojokerta, justru wanitalah yang menjadi ketua komisi B dan dia bukan pensiunan ketua Bappeda (Surya, Juni 1997). Tampaklah bahwa apa yang sudah dipercaya sebagai strategi mengamankan pembangunan dengan mendudukan secara otomatis eks ketua Bappeda menjadi ketua komisi B adalah kebijakan pimpinan Golkar lokal. Namun, dalam perspektif gender bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan strategi memenangkan kepentingan patriarkhi dengan cara memanipulasi kesadaran para wanita. Hal ini amat mudah terjadi karena struktur kekuasaan didominasi oleh laki-laki (DAWN 1995).

Tidak satupun wanita informan yang menduduki unsur pimpinan di tingkat dewan. Dari seluruh anggota dewan tingkat II se-Jatim, hanya seorang yang duduk di unsur pimpinan namun masih di tingkat fraksi, yaitu wakil ketua FKP di Kabupaten Tuban (Surya, 24 Juli 1997). Secara lengkap distribusi posisi informan di dalam dewan adalah sbb:

Tabel 5: Posisi Informan dalam Dewan

Asal Fraksi	Jabatan dalam Dewan
FKP	11 (seluruhnya anggota komisi)
FPP	3 orang : (1) ketua komisi E (1) wakil ketua komisi B (1) wakil ketua komisi E
FABRI	1 orang (anggota komisi)

4.1.5. Menurut Asal Organisasi Massa

Yang menarik adalah distribusi responden bila dikaitkan dengan asal organisasi massa mereka. Terdapat empat anggota legislatif wanita yang mempunyai latar belakang sebagai aktivis Fatayat yang berbasis pada NU (Nahdatul Ulama). Namun ketiganya berpolitik praktis di partai yang berbeda yaitu di Fraksi Karya Pembangunan (1 orang) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (2 orang).

Sedangkan para anggota ormas-ormas yang berada dalam payung Golkar dapat dipastikan mereka akan berkarier politik di Golkar. Ormas-ormas tersebut adalah: FKPP (1 orang), Persit/ Bhayangkari (4 orang), Himpunan Karya Pembangunan (4 orang), Ikatan Bidan Indonesia (1 orang). Hanya satu orang informan yang berlatar belakang organisasi Muhammadiyah, yaitu Aisyah yang akhirnya memilih berkarier di Partai Persatuan Pembangunan.

Satu informan tidak pernah terlibat pada organisasi massa, yaitu informan anggota FABRI. Meski demikian, jika ditelusuri unsur kesamaannya, maka akan terdapat 6 anggota yang mempunyai latar belakang unsur ABRI.

Sedangkan yang mempunyai latar belakang ormas Islam akan berjumlah 3 orang. Dan sisanya, yaitu para anggota yang berlatar belakang kekarwaan murni berjumlah 6 orang (lihat Tabel 6)

Tabel 6: Responden menurut Organisasi Massa

Organisasi Massa	Persentase
FKPPI	7
Fatayat-NU	20
Aisyah	7
Persit/ Bhayangkari	26
IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	7
HWK/ PKK	26
(tidak punya)	7
JUMLAH	100% (N=15)

4.1.6. Status Perkawinan

Seluruh anggota legislatif adalah berstatus kawin/ janda karena suami meninggal. Hanya tiga orang berstatus janda (dua dari FKP dan satu orang dari FPP) sedangkan 12 orang

lainnya adalah berstatus sebagai istri. (Lihat tabel 7)

Sebagian besar suami dari anggota legislatif dari Fraksi Karya Pembangunan yang berasal dari unsur non-ABRI mempunyai suami yang berkarir di Lembaga Eksekutif. Dari 9 anggota FKP yang mempunyai suami sebanyak 4 (dari 5 orang) mempunyai suami yang bekerja sebagai karyawan Pemda.

Hanya satu orang anggota FKP yang suaminya bekerja di swasta. Sedangkan 4 anggota bersuamikan ABRI aktif. Di salah satu wilayah sampel, Kabupaten Nganjuk, kedua suami anggota FKP adalah asisten Bupati. Sedangkan satu orang janda sedang dua lainnya bersuamikan ABRI aktif.

Tabel 7: Satus Perkawinan Responden

Status Perkawinan	Persentase
Kawin (bersuami)	80
Janda kawin	20
JUMLAH	100%(N=100)

4.2. Emansipasi Berdasar Islam



Meskipun terdapat cukup banyak feminis yang menganggap bahwa ajaran Islam merupakan sumber dari munculnya berbagai persoalan wanita (Uhlir 1995), namun sebagian informan justru menjadikan ajaran Islam sebagai batasan bagi pengertian emansipasi mereka. Sebanyak 93% informan beragama Islam tersebut dengan tegas menyatakan bahwa emansipasi wanita harus tidak bertentangan dengan

Islam. Tidak ditemukan pendapat untuk mendefinisikan eman sipasi bedasar dari diskursus lain.

Bagi informan, ajaran Islam ternyata lebih dipandang sebagai penghambat daripada sebagai pemberi inspirasi bagi gerakan emansipasi wanita. Terdapat kecenderungan bahwa para informan melihat bahwa ajaran Islam adalah pembatas agar wanita tidak '*kebablasan*' (lepas kontrol) dalam beremansipasi.

Sebenarnya, persoalan utamanya adalah terletak pada persoalan tentang '*interpretasi*' ajaran agama. Di sisi lain, cukup banyak feminis yang berpandangan bahwa justru Islam-lah sebenarnya agama yang memperjuangkan emansipasi wanita karena Islam-lah mengamanatkan kesetaraan gender (Hafidz 1993).

Batasan yang dianggap harus dipatuhi oleh informan adalah kodrat. Dalam penguraian pengertian kodrat inilah muncul berbagai interpretasi. Kodrat tidak saja dikaitkan dengan biologis-seksual (Fakih 1996), namun termasuk beberapa peran gender diartikan kodrat. Misalnya adalah peran wanita sebagai pengelola dan penanggung jawab utama urusan rumah tangga. Berkarier di sektor publik hanya bisa ditolerir sepanjang semua urusan rumah tangga diselesaikan terlebih dulu.

Lebih lanjut, terutama informan berlatar belakang Islam percaya bahwa pria memang dikodratkan untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Dalam pengertian ini adalah termasuk kodrat pria untuk menjadi pemimpin masyarakat. Salah seorang informan bahkan dengan tanpa ragu menyatakan bahwa dirinya lebih '*srag*' (mantap) jika dikodratkan

oleh seorang pria daripada seorang wanita. Alasannya adalah karena pria lebih mampu memimpin daripada wanita. Menurutnyapun ada kecenderungan kuat bahwa wanita akan mudah dipengaruhi/ menuruti kata suami tentang apa saja termasuk dalam memimpin anak buahnya dalam organisasi.

Adanya kerancuan pemahaman antara kodrat dan peran gender menjadi makin rancu ketika mereka percaya bahwa kodrat dalam pengertian yang dipercaya tersebut bersumber dari ajaran Islam. Fenomena tersebut menunjukkan ada sikap apriori dan mencurigai konsep emansipasi tersebut. Masuk akal karena memang konsep emansipasi yang merupakan bagian dari diskursus demokrasi ini termasuk sebagai *western's invention* (Dahl 1990) sehingga ada sikap curiga dan enggan untuk dicap sebagai bagian dari gerakan aktivis LSM. Penerimaan masyarakat Indonesia yang masih penuh curiga terhadap gerakan feminis ini memang fakta yang dialami terutama oleh kelompok feminis LSM Indonesia (Solidaritas Perempuan 1993).

Tampaknya pula Kartini yang sudah memperjuangkan emansipasi wanita lebih satu abad yang lalu (Jayawerdana 1986) tidak dijadikan pertimbangan bagi informan. Kartini sudah membuktikan bahwa ia memang terinspirasi gerakan feminisme Barat namun ada proses seleksi dalam penerimaan tersebut. Hal yang demikian adalah wajar sebagaimana dikatakan oleh Uhlin (1995) bahwa akan terdapat 3 reaksi penerima konsep dari luar yaitu adopsi utuh,

disesuaikan kondisi lokal atau penolakan (*adoption, adjutment atau rejection*).

Meski demikian, penelitian para feminis Islam sebenarnya telah pula membuktikan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri penuh dengan ayat yang mencerminkan nilai-nilai emansipasi wanita (Farmisi 1992, Hafidz 1992) Ini artinya, nilai-nilai emansipasi tidak sepenuhnya berasal dari Barat namun tidak pula merupakan unsur eksklusif suatu budaya lokal tertentu Tegassnya, nilai emansipasi wanita adalah salah satu unsur nilai universal demokrasi (Uhlin 1995)

4.3. Persoalan Mendasar Wanita

Jawaban para informan dari FKP sempat mengejutkan peneliti ketika ditanyakan tentang apa persoalan mendasar dewasa ini menurut mereka. Ada sebanyak 26% menyatakan tidak tahu. Alasan mereka adalah karena mereka belum benar-benar memikirkan isu perempuan terutama karena mereka belum ditempatkan di komisi mana. Menurut mereka jika mereka di komisi E mungkin mereka bisa memberikan jawabannya.

Alasan yang lain adalah bahwa mereka belum benar-benar berfungsi (penelitian dilaksanakan beberapa saat setelah pelantikan-pen). Jadi menunggu keputusan komisi, tidak malah mendahului. Lebih lanjut informan menyatakan bahwa dunia politik adalah hal yang baru baginya. Jadi ia butuh waktu untuk mempelajarinya hingga ia tahu pasti apa yang akan dia lakukan

Adanya mekanisme penunjukkan dari atasan dapat dipastikan sebagai penyebab tidak siapnya anggota DPRD wanita tersebut. Hal ini terutama terjadi di kalangan anggota istri ABRI. Komandan Kodim (dan istrinya) biasanya adalah penentu penting siapa yang akan dicalonkan dari jalur ABRI. Karena doktrin komando pula, maka penunjukkan itu diartikan sebagai penugasan yang harus dilaksanakan oleh anak buah. Bahkan ada yang berkomentar "*Oh... ini rejeki kok*", ketika ditanyakan tentang proses pencalonan tersebut.

Karena ditetapkan oleh unsur pimpinan, maka informan sendiri tidak tahu alasan penunjukkan dirinya. Salah seorang menduga mungkin unsur tingkat pendidikan-lah yang menyebabkan dia *diutus* oleh pimpinan dalam pencalonan. Ipong S Azhar (1997) dengan tegas menyatakan bahwa proses pemilihan calon akan menentukan kualitas anggota legislatif yang terpilih. Dikatakan bahwa mekanisme yang didominasi elite pimpinan (dan partai) tersebut merupakan salah satu penyebab lemahnya kualitas anggota DPRD.

Anggota FKP lainnya yang berlatar belakang HWK dengan cepat menjawab bahwa persoalan wanita yang paling mendasar saat ini adalah persoalan pelacuran. Dikeluhkan bagaimana sulitnya membina para pelacur tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Memang ada yang kemudian berhenti jadi pelacur, tetapi selalu saja datang kemudian yang baru dalam jumlah yang banyak.

Pelacuran memang menjadi persoalan besar bagi para ibu-ibu PKK. Tampaknya para anggota legislatif yang mempunyai suami aktif di pemerintahan lebih terpaku perannya sebagai istri eksekutif

daripada peran mereka sebagai anggota legislatif. Kesan demikian makin kuat terlihat ketika mereka menjawab pertanyaan tentang program-program mereka sebagai anggota dewan. Dengan lancar mereka menjawab bahwa mereka akan mensukseskan rencana 10 program kerja PKK. Mereka akan membina, memberikan penyuluhan, mengadakan pelatihan dst, sebagaimana layaknya kader PKK.

Ketika diingatkan bahwa bukankah mereka seharusnya lebih bertindak dalam hal pengawasan mengingat fungsi mereka saat ini, mereka mengiyakan. Tetapi dia mengingatkan bahwa bagaimanapun juga ia masih mempunyai kewajiban lain yaitu sebagai anggota Dharma Wanita yang harus mendukung karier suami yang duduk di eksekutif.

Adanya peran kuat unsur eksekutif sebagai pengambil keputusan dalam FKP bisa merupakan alasan mengapa para istri eksekutif duduk menjadi anggota legislatif. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan profesionalisme dalam menjalankan dua fungsi tersebut sekaligus.

Persoalan tersebut memang benar muncul ketika terjadi plotting penempatan anggota ke dalam komisi. Pada awalnya ada ibu yang ditempatkan di komisi B, tapi segera dipindahkan ke komisi lain karena suaminya dipromosikan sebagai ketua Bappeda.

Pertanyaan yang sama diberikan kepada anggota dari FPP dan jawaban yang sama diberikan meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda. Persoalan TKW adalah persoalan wanita yang paling penting bagi mereka. Mereka menyedihkan akibat kepergian tersebut bagi keluarga yang ditinggalkan. Kewajiban istri kepada suami yang

tidak bisa dijalankan dan begitu pula kewajiban ibu dalam membesarkan anak.

Ketika menganalisis TKW, maka muncul kembali penggunaan terminologi 'kodrat' sebagai dasar argumentasi. Menurut responden yang berlatar belakang ormas Islam, mereka semuanya tidak setuju pemberangkatan TKW. Menurut mereka bukan pada tempatnya wanita Islam 'keluar' dari rumahnya. Namun ketika dikonfrontir dengan fakta bahwa mereka terpaksa *keluar rumah* karena para suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami menurut ajaran Islam, mereka menyetujui pula. Kewajiban suami yang dimaksud adalah sebagai pencari nafkah.

Perhatian yang besar terhadap TKW dari anggota FPP tersebut kemungkinan besar karena Bangkalan dan Madura dikenal sebagai pemasok TKW dari Jatim yang cukup besar. Faktor lain adalah karena latar belakang mereka yang seluruhnya lulusan pondok.

Yang menarik, anggota FPP juga menganggap bahwa persoalan buruh wanita industri juga merupakan persoalan urgen. Mereka melihat banyak sekali kejadian yang mengesankan yang dialami buruh wanita industri. Pemberian gaji yang tidak penuh, tidak diberikannya hak untuk cuti haid, hamil atau menyusui oleh pengusaha. Pelanggaran atau tidak dipatuhinya peraturan perundangan oleh pengusaha dituding sebagai penyebab persoalan.

4.4. Melihat Penyebab Persoalan

4.4. Melihat Penyebab Persoalan

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan kuat bahwa informan melihat persoalan wanita dengan analisis fungsionalis, yaitu menyalahkan pihak wanita sendiri sebagai penyebab utama timbulnya persoalan. Kecenderungan demikian dilakukan baik oleh anggota dari FPP maupun dari FKP.

Melihat masalah pelacuran misalnya, adalah disebabkan karena lemahnya ketahanan moral para pelacur yang kemudian diperparah oleh minimnya ketrampilan dan rendahnya pendidikan. Tentu saja ini tidak berdasar samasekali. Setidaknya, penelitian Emmy Susanty (1994), Penelitian Hot-Line Surya (1996) atau penelitian Team Depnaker Pusat (1997) menunjukkan bahwa kemiskinanlah yang mendorong munculnya pelacuran kelas bawah.

Di saat yang sama, para anggota dari FPP juga melihat bahwa *kerakusan* terhadap materi dari para wanita tersebut merupakan pendorong utama bagi wanita-wanita di daerahnya untuk jadi TKW. Jika para wanita mau menerima keadaan yang ada atau membuka usaha kecil-kecilan maka mereka tidak perlu menjadi TKW. Pendapat ini tentu saja bertentangan dengan temuan penelitian Daiva Stasiulus (1997) yang meneliti TKW Asia. Ternyata, faktor kemiskinan-lah yang merupakan pendorong utama para wanita memutuskan untuk menjadi TKW. Begitu mereka sudah memperoleh modal minimal (biasanya sawah, rumah, modal untuk buka usaha/ *mracang*) maka mereka akan berhenti menjadi TKW (Solidaritas Perempuan 1994).

Analogi yang sama juga digunakan untuk menganalisis persoalan buruh wanita di industri. Diandaikan bahwa jika para buruh wanita berani, pintar bicara, atau kompak maka mereka akan dapat menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Misalnya dengan membantah, memprotes atau melaporkan pelanggaran para pengusaha kepada Depnaker. Pendidikan para buruh wanita yang rendah merupakan penyebab dasar mengapa buruh wanita kemudian memiliki inferioritas di atas.

Tentu saja persoalannya tidaklah begitu sederhana. Adanya peraturan-peraturan perundangan yang lebih memihak kepada pengusaha daripada pekerja tentu juga merupakan persoalan besar pula. Apalagi dengan telah disahkannya UUK 1997 oleh DPR dimana perjuangan buruh wanita untuk memperoleh hak cuti haid, hamil, menyusui menjadi sangat lemah. Hal ini diperparah pula oleh keleluasaan pengusaha untuk mengadakan PHK secara sepihak tanpa sepengetahuan P4D atau Depnaker (Undang-Undang Tenaga Kerja 1997). Hal yang merupakan akar persoalan tersebut sayangnya lepas dari pengamatan anggota dewan wanita.

4.5. Kepentingan Jender

Tampak nyata bahwa konsep/ terminologi kepentingan jender praktis/ strategis masih asing bagi para informan. Pertanyaan tidak dengan cepat dijawab namun ketika format pertanyaan diubah maka barulah informan menjawab.

Sebagaimana dengan dugaan sebelumnya, maka anggota legislatif dari FKP lebih menaruh perhatian pada persoalan-persoalan praktis. Menurut para informan, yang paling mendesak untuk ditangani adalah pemenuhan kepentingan praktis semacam pelatihan, penyuluhan, pendidikan. Memperluas jangkauan target, meningkatkan frekwensi kegiatan adalah menurutnya yang paling mendesak. Kelompok pelacur dan petani di pedesaan adalah kelompok yang harus mendapatkan prioritas.

Kepentingan akan perbaikan status wanita melalui perbaikan sistem hukum hanya disetujui tanpa memberikan respon penjelasan mendetail. Respon demikian adalah wajar mengingat bahwa pemahaman persoalan wanita adalah lebih disebabkan oleh faktor wanitanya sendiri sehingga memang tidak ada persoalan di tingkat struktur.

Respon menarik diberikan oleh informan dari FPP. Mereka melihat negara berkontribusi terhadap permasalahan yang sedang ditanggung oleh para TKW. Jika memang pemerintah tidak bisa memberi perlindungan, sebaiknya dihentikan saja pengiriman TKW. Apalagi sebenarnya pengiriman tersebut amat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam terutama karena mereka dianggap sebagai 'budak' oleh majikan Arab. Sedangkan Islam sendiri sudah tidak membolehkan perbudakan dijalankan di muka bumi.

Meski demikian, jika toh pemerintah tidak mau menghentikan pengiriman TKW karena alasan ekonomi, seharusnya ada kebijakan untuk menyeleksi para TKW. Sebaiknya dikirim yang belum berkeluarga, berketrampilan tinggi, dan berpendidikan memadai.

Diharapkan dengan adanya kriteria tersebut di atas TKW yang akan dikirim mampu menjaga diri dan mengadakan perlawanan terhadap kemungkinan buruk di tempat rantauan.

Tentang persoalan buruh wanita industri, rekomendasinya tetap berupa pelatihan untuk meningkatkan kemandirian buruh. Sedangkan pola relasi antar berbagai pihak yang terkait, militer, pengusaha, Depnaker, SPSI, P4D tidak disinggung samasekali. Usul yang lain adalah perlunya pemerintah menaikkan UMR saat ini. Dikatakan bahwa jumlah tersebut amat tidak memadai dengan kenaikan biaya hidup di daerah Pasuruan saat ini.

Peningkatan UMR tersebut juga dirasakan akan dapat mencegah para buruh wanita untuk menjalankan profesi ganda sebagai wanita penghibur dengan alasan ekonomi. Kecenderungan tersebut mulai dilihat sebagai potensial persoalan sosial di masa mendatang. Oleh karenanya, kebijakan untuk menaikkan UMR diharapkan akan mampu mengurangi kecenderungan negatif tersebut.

Pembicaraan tentang pemenuhan kepentingan gender strategis akhirnya dengan mengambil situasi lokal informan. Isu yang dijadikan umpan adalah termarjinalnya posisi wanita anggota di dalam dewan. Respon agak emosional akhirnya terungkap bahwa memang plotting dirasakan tidak adil bagi para wanita. Para anggota tidak pernah diajak bicara tentang plotting dirinya. Pemberian posisi mutlak menjadi wewenang pimpinan fraksi dan dewan.

Keputusan pimpinan fraksi/ dewan, yang didominasi laki-laki, akan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Gaya kepemimpinan

sistem komando amat kuat diterapkan. Kepatuhan kepada pimpinan adalah merupakan ukuran loyalitas. Hal ini wajar karena semua pimpinan DPRD di seluruh Jawa Timur (Indonesia mungkin?) adalah pensiunan ABRI.

Struktur dewan dan gaya manajemen ala militer yang demikian tentu saja tidak menguntungkan bagi para wanita. Gaya kepemimpinan yang menggunakan paradigma maskulinitas militer tentu akan merupakan halangan serius bagi perjuangan emansipasi yang menggunakan paradigma femininitas (Fakih 1996, Hafidz 1993).

Namun unsur internal informan wanitapun merupakan persoalan yang dapat memperburuk situasi tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam profil informan, ternyata sebagian besar informan berasal dari unsur ABRI. Tentu saja ada kepentingan bagi para informan untuk melanggengkan struktur yang sudah ada demi terpeliharanya *status quo* kelas/ kelompok.

Sebagaimana yang dikatakan Alvarez (1995), situasi di atas makin membuat gamblang bahwa perjuangan emansipasi oleh para politisi wanita dalam situasi krusial. Ada benturan kepentingan kelas/ kelompok. Karena mereka berasal dari kelompok dominan maka para anggota tersebut lebih mementingkan kepentingan mempertahankan dominasi kelompok daripada memperjuangkan demokratisasi berbasis pada perjuangan jender.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Isu gender hampir bisa dikatakan merupakan *the hottest issue* bagi banyak segmen dalam masyarakat. Tentu saja banyak ragam sikap dalam menanggapi isu tersebut. Ada respon yang menolak, mencurigai, atau menerima dengan perasaan takut. Sebagaimana lazimnya sikap terhadap isu yang dari luar, maka reaksi-reaksi tersebut bisa dikategorikan ke dalam tiga bentuk sikap; adopsi seutuhnya, menyesuaikannya ke dalam situasi lokal, atau menolaknya (Uhlin 1995).

Perspektif anggota legislatif wanita Dati II di Jawa Timur telah dipilih untuk dilihat responnya terhadap isu gender/ feminisme. Dengan diketahuinya perspektif mereka diharapkan kita akan memperoleh pengetahuan yang memadai tentang perspektif segmen penting ini dalam kaitannya sebagai potensial pembawa perubahan di tingkat struktur.

Para wanita anggota legislatif wanita tersebut relatif tidak mendapatkan keuntungan dari kuatnya isu gender di Indonesia. Selain proporsi politisi wanita yang masih sedikit (7%) dibandingkan proporsi jumlah penduduk wanita dibanding pria yang rasionya sebesar 55% : 45%, posisi politisi wanita amatlah marginal dalam dewan.

Namun yang lebih penting adalah tingkat kesadaran mereka dalam mensikapi isu emansipasi/ feminisme. Tampaknya, ada ketidak-sinkronan sikap para informan. Yang paling menonjol adalah keyakinan bahwa Al-

Qur'an merupakan pembatas bagi nilai-nilai emansipasi. Sedangkan fakta bahwa justru Al-Qu'an merupakan sumber-sumber nilai emansipatif tidak menjadi pemikiran mereka.

Namun, keyakinan yang keliru namun mereka tidak menyadarinya tersebut bahkan menjadikan kita prihatin. Perilaku 'dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu' ini perlu dijadikan perenungan terutama mengingat potensi besar mereka sebagai sumber bagi perubahan menuju keadilan gender.

Selain itu, sebagaimana pada umumnya maka kerangka kesadaran mereka berdasar pada jawaban-jawaban terhadap persoalan pokok penelitian dapat kita kategorikan ke dalam aliran Fungsionalis-Struktural. Sedangkan, aliran feminis yang terpengaruh kuat oleh paradigma ini adalah Aliran Feminisme Liberal, suatu aliran yang justru menakutkan kebanyakan wanita Timur. Suatu sikap ambivalensi ini menjadikan tidak terfokusnya pemahaman tentang tentang emansipasi/ feminisme.

Secara skematik bisa digambarkan sebagai berikut:

AKTOR	ISU GENDER	AKAR PERSOALAN	SOLUSI
FKP/ ABRI	- Pendidikan. - Pelacuran	"Bodohnya" wanita	- pendidikan - pelatihan - penyuluhan
FPP	- TKW - Buruh Indust.	- TKW sendiri - Buruhnya sendiri	popengambilan seleksi - pendidikan

5.2. Saran

Jelas bahwa keberhasilan gerakan gender amat tergantung pada pihak wanita sendiri. Memang ada persoalan di tingkat kultural dan sistem/ struktur, namun perubahan di tingkat tersebut amat tergantung dari perjuangan personal wanita sendiri. Oleh karenanya perlu diadakan pendidikan/ pelatihan penyadaran analisis gender yang akan membantu peserta pelatihan secara tajam mengadakan analisis sosial dan gender. Sehingga mampu melihat akar persoalan dari persoalan sosial yang ada.

Meski demikian, kesadaran personal tersebut tanpa disertai kesadaran akan perlunya transformasi sosial tidak akan bermakna apa-apa bagi terwujudnya pola hubungan gender yang adil dan setara. Ini akan menjadi titik kritis karena kebanyakan anggota legislatif wanita berasal dari kelas yang sama dengan kelas yang sedang mendominasi sistem sosial saat ini. Benturan kepentingan kelas dan gender ini akan menjadi persoalan internal individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez, 1995, *Engendering Democracy in Brazil. Women's Movements in Transition Politics*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey
- Azhar Ipong S., 1997, *Benarkah DPR Mandul, Pemilu, Partai dan DPR Masa Orde Baru*, Bigraf Publishing, Bandung
- Dahl, Robert 1990, *Polyarchy*, New Haven: Yale University Press
- DAWN, 1992, *Alternative Development*, Zed Book
- Fakih, Manour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar
- Farmizi, Fatimah, 1992, *Perempuan dalam Al-Qur'an*, *Journal Ulumul Qur'an Vol 2*
- Eichler, M., 1977, *Towards a Sociology of Feminist Research in Canada*, Group for research on Women, Toronto
- , 1980, *The Double Standard: a feminist critique of feminist social science*, Croom Helm, London
- Forum, Edisi Khusus, Agustus 1997
- Franco, J., 1988, *Beyond Ethnocentrism. Power and The Third world Intelegensia* in Nelson and Grossberg (eds), Reading Blocs. ISS 1995
- Freeman, J., 1975, *The Polititics of Women's Liberation: a case study of an emerging social movement and its relation to the policy process*, Mc Kay, New York
- Gita Sen, 1984, *With Green Grown*, DAWN, Institute of Social Studi, Den Haag
- Grant R., dan K. Newland,, *Gender and International Relations*, Buchanan, Open UP.
- Hafidz, Wardah (1993) *Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia*, dalam Fauzie Ridjal. Lusi
- Hafidz, Wardah (1992) *Perempuan di Hadapan Tuhan*, *Journal Ulumul Qur'an Vol 2*.

Heidi Hartman, 1992, *Feminist Philosophis, Problems, Theories, and Applications*, Prentice Hall, Englewood Cliffs

Hot-Line Surya, 1997. Pekerja Sek Komersial di Surabaya. makalah seminar pada *Seminar Eksploitasi Seks pada Anak-anak di PPSW Unair* tanggal 6 Desember 1997

Jayawerdana, Kumari, 1986, *Feminism and Nationalism in the Third World*, London: Zed Books

kadyoti. Denis, 1988. *Bargaining with Patriachy Gender and Society*, London Sage

kalyanamitra, 1992, *Kalyanamitra Women's Communication and Information Center at Glance*, Jakarta (Leaflet)

Margiyani & Agus Fhari Husein (eds) *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

Maria Mies, 1991, *International Relation and Gender*, Reading Blocs. ISS, Den Haag

----- (ed.), 1991, *Fighting On Two Fronts: Women's Struggles and Research*, ISS, Den Haag

----- and Rhoda Reddock (ed.), 1991, *National Liberation and Women's Liberation*, ISS, Den Haag

Molyneux, M., 1986. Mobilization Without Emancipation? women's Interests. State, and Revolution dalam *Transition and development of Third World Socialism*, ed. Richard R. Fagen, Carmen Diana Deere, and Jose Luis Coraggio, Monthly Review Press, New York.

Moser, Caroline, 1987, *Gender Interests in The Third World*, Reading Blocs

Nederveen Pieterse, J., (ed), 1992, *Emancipation, Modern and Post Modern*, London, Sage

Patton, Michael Quinn, 1980, *Qualitative Evaluation Methods*, Baverly Hills & London, Sage.

Surya, 5 Juli 1996

Susanty, Emmy dan Bagong Suyanto, 1996. *Pelacuran di Surabaya*, Penelitian tidak diterbitkan, FISIP Unair dan Bappeda KMS

Uhlir, Anders, 1996, *Democracy and Diffusion. Transnational Lesson-Drawing among Indonesia Pro-Democracy Actors*. Lund Political Studies, Denmark

Wierenga, Saskia, 1995, Two Indonesian Women's Organizations: Gerwani and the PKK, *Bulletin of Concerned Asian Scholars* Vol. 25, No.2: 17-31

9 MAY 2004

PAMERAN

